

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kemiskinan merupakan salah satu permasalahan besar yang terjadi di Indonesia sampai saat ini yang masih melanda sebagian besar pulau-pulau di Indonesia. Kemiskinan merupakan salah satu penyakit dalam ekonomi, sehingga harus disembuhkan atau paling tidak dikurangi. Permasalahan kemiskinan merupakan permasalahan yang kompleks dan bersifat multidimensional. Selain itu, jikalau kemiskinan di Indonesia berkurang secara signifikan, maka akan banyak sekali permasalahan-permasalahan akut yang terjadi seperti pencurian, perampokan, dan lain sebagainya akan segera terselesaikan.

Mengingat kemiskinan adalah masalah multidimensional maka upaya penanggulangannya membutuhkan berbagai langkah dan melibatkan semua pihak, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah maupun komponen dari masyarakat sendiri. Diantara saluran yang dapat diharapkan untuk menanggulangi kemiskinan adalah desentralisasi fiskal. Terdapat beberapa argumentasi mengenai keterkaitan desentralisasi fiskal dengan upaya penanggulangan kemiskinan. Menurut Boex, dkk (2006), meskipun maknanya berbeda, konsep desentralisasi dan penanggulangan kemiskinan memiliki kesamaan ciri. *Pertama*, definisi yang dipakai untuk menjelaskan keduanya berubah seiring berkembangnya pemahaman manusia terhadap keduanya. *Kedua*, sebagai konsekuensinya, kedua konsep tidak mudah dikuantifisir. *Ketiga*, yang lebih substantif, keduanya sangat berhubungan dengan pemberdayaan (*empowerment*). Desentralisasi berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat melalui pemberdayaan

pemerintah daerahnya, sementara penanggulangan kemiskinan juga menyangkut pemberdayaan sekelompok masyarakat, yakni masyarakat miskin.

Kondisi kemiskinan di Indonesia bisa dibilang masih cukup parah. Menurut data yang dilansirkan oleh BPS (Badan Pusat Statistik), dapat kita lihat pada tabel 1.1 berikut ini:

Tabel 1.1

Kondisi Kemiskinan di Indonesia

Tahun	Jumlah Penduduk	Presentase (%)
2014	27,73 juta jiwa	10,96 %
2015	28,51 juta jiwa	11,13 %

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS)

Berdasarkan tabel diatas, pada tahun 2014, jumlah penduduk miskin di Indonesia mencapai 27,73 juta jiwa (10,96%), kemudian pada tahun 2015, mengalami lonjakan yang cukup signifikan yaitu sekitar 28,51 juta jiwa (11,13%) atau mengalami peningkatan sekitar 780 ribu jiwa dari tahun sebelumnya.

Salah satu provinsi dengan jumlah penduduk miskin terbesar ke-5 secara Nasional adalah Banten. Dimana provinsi Banten mempunyai 4 daerah kabupaten dan 4 daerah kota. Berdasarkan data Statistik Daerah Provinsi Banten 2014-2015, angka kemiskinan mangalami kenaikan. Dapat dilihat pada tabel 1.2 berikut ini:

Tabel 1.2

Kondisi Kemiskinan di Provinsi Banten

Tahun	Jumlah Penduduk	Presentase (%)
September 2014	649,19 ribu jiwa	10,96 %
September 2015	690,67 ribu jiwa	11,13 %

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS)

Berdasarkan tabel diatas, kondisi kemiskinan di Banten pada September 2014, jumlah penduduk miskin sebanyak 649,19 ribu jiwa, sedangkan di periode yang sama pada september 2015 sebanyak 690,67 jiwa yang sebagian besar kelompok masyarakat miskin tersebut berada di daerah pedesaan.

Pemerintah telah melaksanakan program penanggulangan kemiskinan sejak diberlakukannya Peraturan Presiden nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan. Pada pemerintahan baru, terbit Peraturan Presiden Nomor 166 Tahun 2014 tentang Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan. Penanggulangan kemiskinan adalah kebijakan dan program pemerintah pusat dan daerah yang dilakukan secara sistematis, terencana dan bersinergi antara dunia usaha dan masyarakat untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dalam rangka meningkatkan derajat kesejahteraan masyarakat. Dengan diterapkannya Peraturan Presiden Nomor 166 tahun 2014 tersebut, pemerintah meluncurkan kegiatan Pemutakhiran Basis Data terpadu (PBDT), yaitu kegiatan nasional yang bertujuan untuk memastikan Basis Data Terpadu (BDT) sebagai komponen utama dalam sistem penetapan sasaran program penanggulangan kemiskinan di Indonesia. BDT menampilkan informasi kondisi sosio-ekonomi terpadu dari rumah tangga dan individu.

Pendataan kemiskinan ini menjadi acuan penyusunan kebijakan untuk mengurangi kemiskinan. Mengingat urgensi penyediaan data kemiskinan di daerah dan sebagai tindak lanjut dari program tersebut, TKPKD (Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah) Kota Serang menyusun aplikasi sistem informasi data kemiskinan bertajuk Sistem Informasi Penanggulangan Kemiskinan yaitu Madani Siangkis.

Sistem Informasi Penanggulangan Kemiskinan merupakan sistem basis data terpadu yang menyajikan data kemiskinan Kota Serang, program kegiatan pengentasan kemiskinan, realisasi bantuan, monitoring dan evaluasi. Tujuan dari penyusunan

aplikasi Madani Sinangkis yaitu sebagai acuan dalam penyusunan kebijakan penanggulangan kemiskinan. Aplikasi ini nantinya dapat dijadikan acuan dalam pemberian bantuan dan menjadi alat pemantauan (*monitoring*) dan evaluasi kebijakan penanggulangan kemiskinan. Data yang disediakan di aplikasi ini terdiri dari data individu, data rumah tangga, program kegiatan dan peta kemiskinan.

Sistem Informasi Penanggulangan Kemiskinan (SINANGKIS) memiliki beberapa fitur yang telah disesuaikan dengan tujuan penanggulangan kemiskinan. Fitur-fitur disediakan untuk dua jenis pengguna, yaitu pengguna umum dan pengguna khusus yang harus melakukan login. Pengguna umum dapat melihat data kemiskinan dan peta kemiskinan dari rekapitulasi data individu dan data rumah tangga. Selain itu pengguna umum juga dapat mengunduh hasil rekapitulasi data kemiskinan dalam format *excel* dan *pdf*. Sedangkan pengguna khusus dapat mengakses fitur-fitur tambahan seperti mengakses, merubah, menambah, menghapus dan melakukan pencarian data individu dan data rumah tangga.

MADANI SINANGKIS juga menyediakan sistem perankingan kemiskinan dengan menggunakan metode *analytical hierarchy process* (AHP). Metode ini merupakan metode penilaian yang dilakukan dengan cara membandingkan antar kelas kriteria. Pada Sistem Informasi Penanggulangan Kemiskinan, sistem perankingan yang dibuat yaitu berdasarkan tingkat pendidikan dan tingkat ekonomi. Pembagian sistem ini disesuaikan dengan program bantuan yang akan dilakukan oleh Pemerintah Kota Serang.

Pembangunan Sistem Informasi Penanggulangan Kemiskinan Kota Serang merupakan upaya penanggulangan kemiskinan dan menjawab amanat Peraturan Presiden Nomor 166 Tahun 2014 Tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan.

Dengan adanya aplikasi ini diharapkan penurunan tingkat kemiskinan secara menyeluruh dapat segera diwujudkan.

Fenomena kemiskinan yang terjadi di Provinsi Banten terutama di Kota Serang merupakan fenomena yang kompleks yang tidak akan mudah diatasi oleh pemerintah. Dari berbagai pemaparan di atas, penulis sangat tertarik untuk mengulas lebih dalam mengenai sebuah aplikasi yang diberi nama “MADANI SINANGKIS” yang merupakan teknologi informasi untuk menanggulangi tingkat kemiskinan. Hingga akhirnya penelitian ini saya berikan judul “Inovasi Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Teknologi Informasi (Studi Kasus : Aplikasi “MADANI SINANGKIS” Di Kota Serang)”.

B. Rumusan Masalah

Bagaimanakah inovasi penerapan aplikasi “MADANI SINANGKIS” dalam pengentasan kemiskinan di Kota Serang?

C. Tujuan dan manfaat Penelitian

C.1 Tujuan Penelitian

1. Mengetahui bagaimana penerapan aplikasi MADANI SINANGKIS dalam pengentasan kemiskinan di kota Serang.
2. Mengetahui bagaimana tingkat keberhasilan penerapan aplikasi MADANI SINANGKIS dalam pengentasan kemiskinan.
3. Mengetahui sejauh mana capaian pemerintah daerah dalam mengentaskan kemiskinan melalui aplikasi MADANI SINANGKIS.

C.2 Manfaat Penelitian

C.2.1 Manfaat Teoritis

1. Memberikan tambahan wawasan dalam perkembangan ilmu pengetahuan serta dapat meningkatkan pengetahuan penulis dalam aplikasi dan teori.
2. Diharapkan dapat menambah referensi kepustakaan bagi mahasiswa.

C.2.2 Manfaat Praktis

1. Sebagai masukan kepada pemerintah kota serang dalam mengambil kebijakan menyangkut pengentasan kemiskinan.

2. Sebagai acuan dan bahan pertimbangan oleh berbagai pihak yang berkepentingan dalam membuat kebijakan dan strategi penanggulangan kemiskinan.
3. Mengetahui penerapan aplikasi MADANI SINANGKIS apakah dapat mengurangi tingkat kemiskinan atau tidak.

D. Kerangka Dasar Teori

D.1 Inovasi

Kata inovasi berasal dari bahasa Inggris *innovation* berarti perubahan. Inovasi dapat didefinisikan sebagai suatu proses kegiatan atau pemikiran manusia untuk menemukan sesuatu yang baru yang berkaitan dengan input, proses, dan output, serta dapat memberikan manfaat dalam kehidupan manusia. Inovasi yang berkaitan dengan input diartikan sebagai pola-pola pemikiran atau ide manusia yang disumbangkan pada temuan baru. Adapun inovasi yang berkaitan dengan proses banyak berorientasi pada metode, teknik, ataupun cara bekerja dalam rangka menghasilkan sesuatu yang baru. Selanjutnya, inovasi yang berkaitan dengan output berdasarkan definisi tersebut lebih ditujukan pada hasil yang telah dicapai terutama penggunaan pola pemikiran dan metode atau teknik kerja yang dilakukan. Ketiga elemen dalam inovasi tersebut sesungguhnya membentuk suatu kesatuan yang utuh. (Makmur & Rohana 2012 : 9)

Selanjutnya Thomas (1996:10) Inovasi didefinisikan sebagai peluncuran sesuatu yang baru. Tujuan diluncurkannya sesuatu yang baru kedalam suatu proses adalah untuk menimbulkan perubahan besar yang radikal. Osborne & Brown (2005) dalam Rahayu Y.S (2015:81) menyatakan bahwa inovasi merupakan representasi dari ketidakberlanjutan kondisi dimasa yang lalu. Ketidakberlanjutan ini menjadi

karakteristik yang membedakan inovasi dari perubahan. Lebih lanjut dikatakan inovasi adalah pengenalan terhadap elemen baru ke dalam pelayanan organisasi dalam bentuk sebuah pengetahuan baru, organisasi baru, manajemen atau keterampilan proses yang baru.

Pugh dalam Rahayu Y.S (2015 : 84) menyatakan inovasi adalah sebuah pengenalan atas fitur baru dalam organisasi. Inovasi dicerminkan oleh produk-produk dan proses produksi baru, kemajuan dalam teknologi komunikasi, organisasi dan layanan baru disektor publik dan sektor non-profit.

Dengan merujuk pada pengertian tersebut, maka sebuah inovasi tidak akan bisa berkembang dalam kondisi status quo. Dan walaupun tidak ada satu kesepakatan definisi mengenai inovasi, namun secara umum dapat disimpulkan bahwa inovasi mempunyai 6 atribut :

1. *Relative Advantage* atau Keuntungan Relatif

Sebuah inovasi harus mempunyai keunggulan dan nilai lebih dibandingkan dengan inovasi sebelumnya. Selalu ada sebuah nilai kebaruan yang melekat dalam inovasi yang menjadi ciri membedakannya dengan yang lain.

2. *Compatibility* atau Kesesuaian

Inovasi juga sebaiknya mempunyai sifat kompatibel atau kesesuaian dengan inovasi yang digantinya. Hal ini dimaksudkan agar inovasi yang lama tidak serta merta dibuang begitu saja, selain karena alasan faktor biaya yang tidak sedikit, namun juga inovasi yang lama menjadi bagian dari proses transisi ke inovasi terbaru. Selain itu juga dapat memudahkan proses adaptasi dan proses pembelajaran terhadap inovasi itu secara lebih cepat

3. *Complexity* atau Kerumitan

Dengan sifatnya yang baru maka inovasi mempunyai tingkat kerumitan yang boleh jadi lebih tinggi dibandingkan dengan inovasi sebelumnya. Namun demikian, karena sebuah inovasi menawarkan cara yang lebih baru dan lebih baik, maka tingkat kerumitan ini pada umumnya tidak menjadi masalah penting.

4. *Triability* atau Kemungkinan dicoba

Inovasi hanya bisa diterima apabila telah teruji dan terbukti mempunyai keuntungan atau nilai lebih dibandingkan dengan inovasi yang lama. Sehingga sebuah produk inovasi harus melewati fase “uji publik”, dimana setiap orang atau pihak mempunyai kesempatan untuk menguji kualitas dari sebuah inovasi.

5. *Observability* atau Kemudahan diamati

Sebuah inovasi harus juga dapat diamati, dari segi bagaimana ia bekerja dan menghasilkan sesuatu yang lebih baik.

Faktor Penghambat Inovasi

Menurut Albury (2003:31), hambatan inovasi diidentifikasi ada delapan jenis, yaitu :

- a. Keengganan menutup program yang gagal.
- b. Ketergantungan berlebihan pada high performer.
- c. Teknologi ada, terhambat budaya dan penataan organisasi.
- d. Tidak ada penghargaan atau insentif.
- e. Ketidakmampuan menghadapi resiko dan perubahan.

- f. Anggaran jangka pendek dan perencanaan.
- g. Tekanan dan hambatan administratif.
- h. Budaya Risk Aversion.

Salah satunya yang dimaksud dengan budaya *risk aversion* adalah budaya yang tidak menyukai resiko. Hal ini berkenaan dengan sifat inovasi yang memiliki segala resiko, termasuk resiko kegagalan. Sektor publik, khususnya pegawai cenderung enggan berhubungan dengan resiko, dan memilih untuk melaksanakan pekerjaan secara prosedural-administratif dengan resiko minimal. Selain itu, secara kelembagaan pun, karakter unit kerja di sektor publik pada umumnya tidak memiliki kemampuan untuk menangani resiko yang muncul akibat dari pekerjaannya.

Hambatan lain adalah ketergantungan terhadap figur tertentu yang memiliki kinerja tinggi, sehingga kecenderungan kebanyakan pegawai di sektor publik hanya menjadi *follower*. Ketika figur tersebut hilang, yang terjadi adalah stagnasi dan kemacetan kerja.

Selain itu, hambatan anggaran yang periodenya terlalu pendek, serta hambatan administratif yang membuat sistem dalam berinovasi menjadi tidak fleksibel. Sejalan dengan itu juga, biasanya penghargaan atas karya-karya inovatif masih sangat sedikit. Sangat disayangkan hanya sedikit apresiasi yang layak atas prestasi pegawai atau unit yang berinovasi.

Dalam hal inovasi di sektor publik, menurut Albury (2003:4) pemerintah mempunyai tiga peranan kebijakan terkait dengan inovasi, yaitu:

1. *Policy innovation*: new policy direction and initiatives (inovasi kebijakan).
2. *Innovations in the policy-making process* (inovasi dalam proses pembuatan kebijakan).

3. *Policy to foster innovation and its diffusion* (kebijakan untuk mengembangkan inovasi dan penyebarannya).

Berkenaan dengan itu Berry & Berry dalam Tyran (2003:5), menjelaskan bahwa penyebaran inovasi kebijakan terjadi dengan merujuk pada dua determinan penting, yaitu internal determinant, dan regional diffusion. Yang dimaksud dengan internal determinant atau penentu internal adalah karakteristik sosial, ekonomi, dan politik sebuah negara menentukan keinovativan sebuah negara. Sedangkan regional diffusion atau difusi regional adalah kemungkinan sebuah negara mengadopsi kebijakan tertentu lebih tinggi jika negara-negara tetangganya telah mengadopsi kebijakan tersebut.

D.2 Kemiskinan

Definisi tentang kemiskinan sangat beragam, mulai dari sekadar ketidakmampuan memenuhi kebutuhan konsumsi dasar dan memperbaiki keadaan, kurangnya kesempatan berusaha, hingga pengertian yang lebih luas yang memasukkan aspek sosial dan moral (Sholeh 2010) dalam Khomsan Ali dkk (2015:1). Dalam arti sempit, kemiskinan dipahami sebagai keadaan kekurangan uang dan barang untuk menjamin kelangsungan hidup. Dalam arti luas, kemiskinan merupakan suatu fenomena *multiface* atau multidimensional (Hamudy 2008). Menurut Kurniawan (2004) kemiskinan adalah apabila pendapatan suatu komunitas berada di bawah satu garis kemiskinan tertentu. Kemiskinan juga berarti kekurangan kebutuhan sosial, termasuk keterkucilan sosial, ketergantungan, dan ketidakmampuan untuk berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat yang layak. Definisi lainnya yang biasa digunakan adalah menurut *European Union* bahwa kemiskinan sebagai kondisi seseorang dengan sumberdaya (material, sosial dan budaya) yang sangat terbatas (Anonymous, tanpa tahun).

Pada konferensi PBB terkait Pengembangan Sosial, Deklarasi Copenhagen menjelaskan kemiskinan sebagai "...kondisi yang ditandai oleh kehilangan kebutuhan dasar manusia, termasuk makanan, air minum yang aman, fasilitas sanitasi, kesehatan, perumahan, pendidikan dan informasi" (Anonymous 2006a) dalam Tantoro Swis (2014:38).

Menurut Suparlan (1995), kemiskinan dapat didefinisikan sebagai suatu standar tingkat hidup yang rendah, yaitu adanya suatu tingkat kekurangan materi pada sejumlah atau golongan orang dibandingkan dengan standar kehidupan yang umum berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan. Standar kehidupan yang rendah ini secara langsung tampak pengaruhnya terhadap tingkat kesehatan, kehidupan moral, dan rasa harga diri dari mereka yang tergolong sebagai orang miskin. Bappenas atau Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (1993) menjelaskan kemiskinan adalah situasi serba kekurangan yang terjadi bukan karena dikehendaki oleh si miskin, melainkan karena tidak dapat dihindari dengan kekuatan yang ada padanya.

Chambers dalam Nasikun (2001) mengatakan bahwa kemiskinan adalah suatu *integrated concept* yang memiliki lima dimensi, yaitu: (1) kemiskinan (*poverty*), (2) ketidakberdayaan (*powerless*), (3) kerentanan menghadapi situasi darurat (*state of emergency*), (4) ketergantungan (*dependence*), dan (5) keterasingan (*isolation*) baik secara geografis maupun sosiologis. Hidup dalam kemiskinan bukan hanya hidup dalam kekurangan uang dan tingkat pendapatan rendah, tetapi juga banyak hal lain, seperti : tingkat kesehatan, pendidikan rendah, perlakuan tidak adil dalam hukum, kerentanan terhadap ancaman tindak kriminal, ketidakberdayaan menghadapi kekuasaan, dan ketidakberdayaan dalam menentukan jalan hidupnya sendiri.

Menurut Chambers dalam Nasikun (2001), kemiskinan dapat dibagi dalam empat bentuk, yaitu :

1. Kemiskinan absolut : bila pendapatannya berada di bawah garis kemiskinan atau tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup minimum atau kebutuhan dasar termasuk pangan, sandang, papan, kesehatan, dan pendidikan yang diperlukan untuk bisa hidup dan bekerja.
2. Kemiskinan relatif : kondisi miskin karena pengaruh kebijakan pembangunan yang belum menjangkau seluruh masyarakat, sehingga menyebabkan ketimpangan pada pendapatan atau dapat dikatakan orang tersebut sebenarnya telah hidup diatas garis kemiskinan namun masih berada di bawah kemampuan masyarakat sekitarnya.
3. Kemiskinan kultural : mengacu pada persoalan sikap seseorang atau sekelompok masyarakat yang disebabkan oleh faktor budaya, seperti tidak mau berusaha memperbaiki tingkat kehidupan, malas, pemboros, tidak kreatif meskipun ada bantuan dari pihak luar.
4. Kemiskinan struktural : situasi miskin yang disebabkan karena rendahnya akses terhadap sumber daya yang terjadi dalam suatu sistem budaya dan sosial politik yang tidak mendukung pembebasan kemiskinan, tetapi kerap menyebabkan suburnya kemiskinan.

Kemiskinan adalah situasi serba kekurangan yang terjadi dan di alami seseorang atau keluarga tertentu, bukan karena dikehendaki oleh yang bersangkutan, melainkan karena tidak bisa dihindari dengan kekuatan yang ada padanya.

Antara orang miskin dengan orang yang berkecukupan sangat berbeda keduanya, baik dilihat dalam perkembangan kehidupan sehari-hari maupun dalam

bentuk harapan hidupnya. Orang miskin atau kemiskinan dicirikan oleh ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidup. Masalah yang dialami oleh orang yang terjat dalam kemiskinan, tidak jauh dari kesulitan dan keterbatasan ekonomi.

Ciri-ciri kemiskinan menurut Djudju Sudjana (2001:128) dikelompokkan ke dalam dua kategori, yaitu :

- 1). *Kemiskinan keluarga*, ditandai dengan indikator tingginya angka rata-rata kelahiran dan kematian, tingginya angka pengangguran, tingkat pendapatan rendah, tingkat pendidikan anak rendah, dan pengeluaran untuk konsumsi pangan tidak mencukupi.
- 2). *Kemiskinan wilayah*, memiliki indikator ; rendahnya pendapatan kapita wilayah, tingginya persentase keluarga rawan gizi, umur harapan hidup rendah, rendahnya rata-rata tingkat pendidikan, kondisi pemukiman, transportasi, sarana air bersih jalan, fasilitas kesehatan, sarana pendidikan dan fasilitas umum lainnya tidak mencukupi.

Sedangkan menurut BKKBN (Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional) menetapkan lima kriteria untuk menentukan penduduk yang dapat digolongkan miskin, yaitu : (1) kualitas perumahan, (2) kualitas sandang, (3) kualitas pangan, (4) kualitas keberagaman, dan (5) kualitas kesehatan. Pada kualitas perumahan dapat dilihat dari keadaan rumah suatu keluarga, lantai tanah, semi permanen, dan non permanen, serta keadaan lainnya yang tidak mencerminkan kualitas perumahan keluarga yang sehat. Kualitas sandang, yaitu apabila pakaian yang dipakai pada forum resmi juga dipakai dirumah, artinya seseorang tidak terlalu banyak pilihan untuk memilih jenis pakaian yang sesuai dengan situasi, maka ia dapat dikatakan miskin. Kemudian, apabila keluarga atau seseorang makan hanya maksimal dua kali sehari dengan lauk pauk yang kurang bergizi, maka dapat dimasukkan dalam kategori miskin.

Bila seseorang atau keluarga jarang menunaikan ibadah karena waktunya tersita untuk mencari penghasilan, maka mereka dapat dikatakan miskin. Terakhir, apabila seseorang atau suatu keluarga jarang mendapatkan pelayanan kesehatan dari tenaga medis karena tidak mampu menjangkau biaya pelayanan kesehatan, maka mereka dapat dikategorikan miskin.

Penyebab kemiskinan

Teori Neo-Liberal secara tuntas mengatakan bahwa penyebab kemiskinan adalah karena beberapa kelemahan, yaitu : 1)Kelemahan dan pilihan-pilihan individual. 2)Lemahnya pengaturan pendapatan. 3)Lemahnya kepribadian individu (malas, pasrah, dan bodoh). Sedangkan menurut teori social democrat penyebab kemiskinan secara structural adalah karena ketimpangan struktur ekonomi dan struktur politik yaitu suatu ketidakadilan sosial dalam masyarakat (Cox 1998) dalam Tantoro Swis (2014:38).

Selanjutnya Djudju Sudjana (2001:127) menyatakan penyebab kemiskinan yang dibagi kedalam 3 (tiga) kategori jenis kemiskinan, yaitu sebagai berikut :

1. kemiskinan natural ialah kondisi kemiskinan dalam masyarakat yang disebabkan karena tidak memiliki sumber daya, baik sumber daya manusia, maupun sumber daya alam, yang dapat mendukung upaya pemberdayaan diri penduduk/masyarakat sehingga mereka mampu meningkatkan taraf hidup dan penghidupannya.
2. Kemiskinan struktural ialah kondisi penduduk atau masyarakat dalam keadaan miskin sebagai akibat dari kebijakan dan pelaksanaan pembangunan yang tidak seiring dan tidak selaras dengan pemerataan pembangunan.
3. Kemiskinan kultural ialah kemiskinan yang dipengaruhi oleh tradisi, adat istiadat, sikap, serta perilaku yang “menghambat kemajuan”. Budaya diam,

masa bodoh, fatalistik, sikap merasa cukup dalam kemiskinan adanya dominasi “kelompok penekan” terhadap masyarakat yang merasa tertekan menjadi indikator dan faktor-faktor penyebab tumbuhnya kemiskinan.

D.3 Teknologi Informasi

Dalam *The Dictionary of Computers, Information Processing and Telecommunications* (Hariyadi, 1993:253), teknologi informasi diberi batasan sebagai teknologi pengadaan, pengolahan, penyimpanan, dan penyebaran berbagai jenis informasi dengan memanfaatkan komputer dan telekomunikasi yang lahir karena “... adanya dorongan-dorongan kuat untuk menciptakan teknologi baru yang dapat mengatasi kelambatan manusia mengolah informasi ...” (Pendit, 1994:37). Kelambatan itu terasa sebab volume informasi semakin cepat membengkak. Pendit menambahkan bahwa teknologi informasi memungkinkan konsumsi informasi dalam jumlah besar dan kecepatan luar biasa. Kemampuan tersebut terutama disebabkan oleh “ujung tombak” teknologi informasi, yakni komputer.

Charles Sanders Peirce (Lubbe dan Nauta, 1992:5-6) mengemukakan dalam filosofi “*triadic*”-nya bahwa teknologi informasi adalah salah satu sudut segitiga sama sisi yang melambangkan teknologi; dua sudut lainnya adalah energi dan materi. Teknologi informasi sendiri lahir sekitar 1947 ditandai dengan ditemukannya komputer sebagai komponen utamanya, setelah masa teknologi yang mengeksploitasi materi 50.000 tahun sebelum Masehi sampai abad ke-18 dan masa teknologi yang mengeksploitasi energi mulai abad ke-18 sampai 1947. Lebih lanjut, Peirce (Lubbe dan Nauta, 1992:6) menyatakan bahwa teknologi informasi dapat pula dilambangkan

sebagai segitiga sama sisi dengan tiga titik sudutnya masing-masing automasi, simulasi/model, dan kecerdasan buatan/sistem berbasis pengetahuan (sistem pakar).

Mendefinisikan teknologi informasi tidak hanya sekedar terbatas pada teknologi komputer (perangkat keras dan perangkat lunak) yang digunakan untuk memproses dan menyimpan informasi, melainkan juga mencakup teknologi komunikasi untuk mengirimkan informasi (Martin, 1999) dalam tjhai (2003:2). Teknologi informasi adalah semua bentuk teknologi yang digunakan dan diterapkan untuk mengolah dan mengirim informasi.

Menurut model yang dikembangkan Thompson et al. (1991) dalam tjhai (2003:5), yang mengadopsi sebagian teori yang diusulkan oleh Triandis (1980), faktor-faktor yang mempengaruhi pemanfaatan teknologi informasi adalah sebagai berikut :

1. Faktor sosial.

Faktor sosial diartikan perasaan dimana orang lain atau lingkungan mengharuskan ia memakai teknologi informasi. Dukungan rekan kerja, atasan, organisasi, dan lingkungan.

2. Affect (perasaan individu)

Affect diartikan perasaan individu, dimana seseorang merasakan nyaman dengan menggunakan teknologi informasi. Agus membuktikan bahwa perasaan individu berpengaruh positif dalam pemanfaatan teknologi informasi. Jika seseorang merasa nyaman dalam memanfaatkan teknologi informasi maka dia akan meningkatkan pemakaian teknologi informasi.

3. Kesesuaian tugas

Kesesuaian tugas dengan teknologi informasi secara lebih spesifik menunjukkan hubungan pemanfaatan teknologi informasi dengan kebutuhan tugas. Tugas diartikan sebagai segala tindakan yang dilakukan oleh individu-individu dalam memproses input maupun output. Karakteristik tugas mencerminkan sifat dan jenis tugas yang memerlukan bantuan teknologi.

4. Konsekuensi jangka panjang

Konsekuensi jangka panjang diukur dari output yang dihasilkan apakah mempunyai keuntungan pada masa yang akan datang, seperti peningkatan karir dan peningkatan kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih penting. Untuk beberapa individu, motivasi untuk menggunakan teknologi informasi dapat dihubungkan dengan rencana pada masa yang akan datang dan tidak hanya memenuhi kebutuhan saat ini. Beatty (1986) dalam Tjhai (2003:9) menemukan hubungan positif antara konsekuensi jangka panjang dengan pemanfaatan teknologi informasi. Hal ini menunjukkan bahwa individu akan meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi jika output yang dihasilkan dari pemanfaatan teknologi informasi dapat memberikan keuntungan pada masa yang akan datang.

5. Kondisi yang memfasilitasi pemanfaatan teknologi informasi

Menurut Triandis (1980) dalam Tjhai (2003:9) kondisi yang memfasilitasi pemanfaatan teknologi informasi meliputi faktor objektif yang ada dilingkungan kerja yang memudahkan pemakai dalam melakukan suatu pekerjaan. Dalam konteks pemanfaatan teknologi informasi, kondisi yang

memfasilitasi dapat dimasukkan sebagai salah satu faktor yang mempengaruhi pemanfaatan teknologi informasi.

6. Kompleksitas

Kompleksitas diartikan sebagai tingkat inovasi yang dipresepsikan sesuatu yang relatif sulit untuk dimengerti dan digunakan. Jika pemanfaatan teknologi informasi dapat ditunjukkan dalam konteks penerimaan atas inovasi, maka hasil ini mendukung sebuah hubungan yang negatif antara kompleksitas dengan pemanfaatan teknologi informasi.

E. Definisi Konseptional

Yang dimaksud dengan definisi konseptional adalah definisi yang digunakan untuk menggambarkan secara tepat suatu fenomena yang akan diteliti. Definisi konseptional ini juga digunakan untuk menggambarkan secara abstrak tentang kejadian, keadaan kelompok atau individu yang menjadi pusat perhatian dalam ilmu sosial (Singarimbun, 1992, hal. 34). Adapun definisi konseptional dari penelitian ini adalah :

1. Inovasi

Inovasi adalah hasil dari sebuah pemikiran manusia yang didalamnya terdapat perubahan-perubahan metode ataupun teknik dalam membuat suatu perencanaan untuk menghasilkan sesuatu yang baru.

2. Kemiskinan

Kemiskinan adalah kondisi dimana seseorang ataupun kelompok tidak mampu lagi memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidupnya dikarenakan

pendapatan yang rendah sedangkan biaya guna mencukupi kebutuhan sangatlah tinggi.

3. Teknologi Informasi

Teknologi informasi adalah sebuah sistem informasi yang menggunakan komputer sebagai basisnya, yang didalamnya terdapat komponen yang diantaranya adalah hardware (komputer, printer, scanner), software (office application) dan perlengkapan telekomunikasi (modem).

F. Definisi Operasional

Definisi operasional adalah definisi yang didasarkan atas sifat-sifat yang didefinisikan yang dapat diamati. Secara tidak langsung definisi operasional itu akan menunjuk alat pengambil data yang cocok digunakan atau mengacu pada bagaimana mengukur suatu variable (Ardinal, 2005, hal. 60). Adapun indikator dari penelitian ini adalah :

1. Unsur-unsur didalam Aplikasi Madani Sinangkis
 1. Angka kemiskinan.
 2. Program kegiatan penanggulangan kemiskinan.
 3. Realisasi bantuan terhadap penduduk miskin.
 4. Pengawasan (*monitoring*) dan evaluasi.
2. Indikator Inovasi yang digunakan dalam penelitian ini:
 1. Terdapat koordinasi antar SKPD mengenai program dalam pengentasan kemiskinan.

2. Masyarakat dapat mengakses informasi mengenai data kemiskinan melalui aplikasi madani sinangkis.
3. Relative Advantage atau keuntungan relative.
4. Compatibility atau kesesuaian.
5. Complexity atau kerumitan.
6. Triability atau kemungkinan dicoba.
7. Observability atau kemudahan diamati.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif. Penelitian ini dilakukan untuk memberikan gambaran secara tepat mengenai sifat-sifat dari keadaan ataupun hubungan antara objek penelitian dengan gejala kemasyarakatan lainnya. Oleh karena itu, penelitian ini adalah penelitian yang berbentuk studi kasus dengan menggunakan analisa deskriptif kualitatif.

2. Jenis Data

1. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari objek penelitian di lapangan. Data ini didapat dari hasil wawancara berbagai pihak yang mengetahui dan memahami mengenai program aplikasi “Madani Sinangkis”. Adapun respondennya yaitu:

- a. Pak Didi Djuanda S.E, Kepala Bidang Perekonomian sebagai informan yang berkompeten mengenai aplikasi Madani Sinangkis.

- b. Pak Heli Priatna, Kepala Seksi Pelayanan Rehabilitasi Sosial sebagai informan yang mengetahui mengenai Rehabilitasi Pengemis di Kota Serang.
- c. Pak Agus, Kabid Pemberdayaan Sosial sebagai informan yang mengetahui mengenai Rehasbilitasi Rumah Tidak Layak Huni

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data-data yang diperoleh dari sumber data tertulis seperti sumber buku-buku atau literatur terkait sistem aplikasi “Madani Sinangkis” serta sumber dari arsip dan dokumen resmi Bappeda yang di dapat saat penelitian.

3. Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara

Dalam hal ini responden yang dipilih adalah narasumber dari kepala Bidang Perekonomian Bappeda Kota Serang yang merupakan pihak dalam peluncuran sistem aplikasi tersebut.

2. Studi Pustaka

Dengan mencari referensi dan literature yang berkaitan dengan sistem Aplikasi Madani Sinangkis. Referensi dapat diakses dari jurnal, buku, maupun surat kabar yang berkaitan dengan topik tersebut.

3. Dokumentasi

Metode yang digunakan untuk mencari data mengenai hal-hal atau variable yang berupa catatan, surat kabar, majalah, notulen dan agenda untuk memperoleh data tentang penerapan sistem aplikasi Madani Sinangkis dalam pengentasan kemiskinan di kota serang.

4. Teknik Analisis Data

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis data kualitatif. Analisis data kualitatif bersifat induktif, yaitu suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh, selanjutnya dikembangkan menjadi hipotesis. Berdasarkan hipotesis yang dirumuskan dari data tersebut, selanjutnya dicarikan data lagi secara berulang-ulang sehingga akhirnya dapat disimpulkan apakah hipotesis tersebut diterima atau ditolak (Rachman, 2011:173). Dalam bukunya Miles (1992:16-17) analisis data terdiri dari 3 alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan yaitu, reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan atau verifikasi.

a. Reduksi data

Reduksi yaitu proses pemilihan pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data “kasar” yang muncul dari catatan tertulis di lapangan.

Dengan “reduksi data” peneliti tidak perlu mengartikannya sebagai kuantifikasi. Data kualitatif dapat disederhanakan dan ditransformasikan dalam aneka macam cara, yakni : melalui seleksi yang ketat, melalui ringkasan atau uraian singkat, menggolongkannya dalam satu pola yang lebih luas, dan sebagainya. Kadangkala dapat juga mengubah data kedalam angka-angka atau peringkat-peringkat, tetapi tindakan ini tidak selalu bijaksana. Reduksi data dilakukan peneliti dengan memilih dan memutuskan data hasil wawancara dan observasi di lapangan.

b. Penyajian data

Penyajian data adalah menyusun sekumpulan informasi yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian-penyajian data yang dirancang guna menggabungkan

informasi yang tersusun dalam suatu bentuk yang padu dan mudah diraih misalnya dituangkan dalam berbagai jenis matriks, grafik, jaringan dan bagan.

c. Penarikan Kesimpulan/ Verifikasi

Penarikan kesimpulan adalah kegiatan mencari arti, mencatat keteraturan, pola-pola penjelasan, alur sebab-akibat dan proposisi. Kesimpulan juga diverifikasikan selama penelitian berlangsung. Verifikasi adalah penarikan kembali yang melintas dalam pikiran penganalisis selama penyimpulan, suatu tinjauan ulang pada catatan-catatan lapangan dan meminta responden yang telah dijarah datanya untuk membaca kesimpulan yang telah disimpulkan peneliti. Makna-makna yang muncul sebagai kesimpulan data teruji kebenarannya, kekokohnya, dan kecocokannya.

Reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan/verifikasi sebagai suatu yang jalin menjalin pada sebelum, selama, dan sesudah pengumpulan data.